

**PANGKALAN
PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN BATAM**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batam, 31 Desember 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Batam,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Semuel Sandi Rundupadang, S.St.Pi, M.Si
NIP. 198103292005021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
Lampiran dan Daftar	x

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
*Jembatan II Bareleng, Pulau Setokok, Bulang, Pulau Setokok, Batam, Kota
Batam, Kepulauan Riau*
(0778) 4091808 Email : psdkp.batam@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, 31 Desember 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Batam,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Semuel Sandi Rundupadang, S.St.Pi, M.Si
NIP. 198103292005021002

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 63,869,772 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada Laporan TA 2025 adalah sebesar Rp. 33,488,956,233 atau mencapai 94,83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 35,312,927,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada TA 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 115,110,234,798 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 845,875,210, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 114,264,359,588 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.13,460,588 dan Rp. 115,110,234,798.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 46,362,472, sedangkan jumlah beban dari kegiatan

operasional adalah sebesar Rp. 41,300,909,098, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 41,254,546,626). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar RP. 17,507,300 dan sebesar (Rp. 41,237,039,326) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 41,237,039,326).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 118,910,635,585 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 115,110,234,798) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp. 24,496,000) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 37,447673951, sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 115,096,774,210.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	63.869.772	0,00	191.101.692
JUMLAH PENDAPATAN		-	63.869.772	0,00	191.101.692
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	13.541.999.000	13.541.111.573	99,99	13.506.510.383
Belanja Barang	B.4	21.626.057.000	19.802.984.600	91,57	37.716.775.794
Belanja Modal	B.5	144.871.000	144.860.060	99,99	5.701.575.017
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		35.312.927.000	33.488.956.233	94,83	56.924.861.194

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM NERACA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Uang Muka Belanja	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.11	845.875.210	1.478.974.439
Jumlah Aset Lancar		845.875.210	1.478.974.439
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15	36.787.450.219	35.080.558.219
Peralatan dan Mesin	C.16	77.892.252.696	102.907.860.249
Gedung dan Bangunan	C.17	40.531.410.504	39.370.536.307
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	39.642.902.775	39.471.257.775
Aset Tetap Lainnya	C.19	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(80.589.656.606)	(99.325.603.705)
Jumlah Aset Tetap		114.264.359.588	117.504.608.845
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	-	-
Aset Lain-Lain	C.23	464.562.800	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(464.562.800)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		115.110.234.798	118.983.583.284
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	13.460.588	72.947.699
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		13.460.588	72.947.699
JUMLAH KEWAJIBAN		13.460.588	72.947.699
EKUITAS			
Ekuitas	C.30	115.096.774.210	118.910.635.585
JUMLAH EKUITAS		115.096.774.210	118.910.635.585
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		115.110.234.798	118.983.583.284

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

III. LAPORAN OPERASIONAL

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	46.362.472	146.031.952
JUMLAH PENDAPATAN		46.362.472	146.031.952
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	13.541.111.573	13.506.510.383
Beban Persediaan	D.3	43.534.217	321.414.888
Beban Barang dan Jasa	D.4	16.291.374.032	25.586.375.793
Beban Pemeliharaan	D.5	2.184.457.686	5.439.325.910
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.282.707.119	6.064.768.315
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	7.957.724.471	9.885.623.850
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		41.300.909.098	60.804.019.139
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(41.254.546.626)	(60.657.987.187)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		8.488.000	-81.311.760
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		8.488.000	30.277.740
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	111.589.500
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		9.019.300	14.792.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		9.019.300	14.792.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		17.507.300	(66.519.760)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(41.237.039.326)	(60.724.506.947)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(41.237.039.326)	(60.724.506.947)

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BATAM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	118.910.635.585	121.943.831.378
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(41.237.039.326)	(60.724.506.947)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(24.496.000)	200.068.152
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(24.496.000)	200.068.152
KOREKSI REKLASIFIKASI	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	37.447.673.951,	57.491.243.002
EKUITAS AKHIR	E.5	115.096.774.210	118.910.635.585

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Dasar Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Hukum Batam merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat
Entitas dan Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Rencana (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan
Strategis dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan. Pangkalan PSDKP memiliki misi yaitu
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan
efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi
birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam merupakan Wilayah
Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 571 yang
meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman. WPP-RI merupakan
wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,
konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi
perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona
tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah
kerja Pangkalan PSDKP Batam berdasarkan Provinsi meliputi
Perairan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Batam mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan
perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di
emban adalah melakukan penyusunan rencana, program dan
evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pangkalan PSDKP Batam berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- Tersedianya infrastruktur Pengawasan SDKP, sistem informasi, dan komunikasi pengawasan SKDP
- Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif
- Terwujudnya ASN UPT PSDKP yang kompeten
- Informasi pengawasan SDKP yang valid, handal, dan mudah diakses
- Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi UPT PSDKP yang berkepribadian
- Terkelolanya anggaran UPT PSDKP secara efisien.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan belann laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam. dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara *First In First Out* (FIFO) di tahun 2023 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2023 tanggal 22 Januari 2023, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan -LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan -LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan

selesai dilaksanakan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan

tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

*Aset
Lainnya*

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam telah mengadakan 9 (Sembilan) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Ada 9 perubahan (Revisi) DIPA pada TA 2025 yaitu:

Revisi DIPA	Tanggal	Nomor	Digital Stamp	Nilai Anggaran
1	21-02-2025	SP DIPA-032.05.2.325156/2025	DS:8410-4864-8065-0016	39.350.325.000
2	24-03-2025	SP DIPA-032.05.2.325156/2025	DS:0261-3019-9074-7414	39.350.325.000
3	14-04-2025	SP DIPA-032.05.2.325156/2025	DS:6531-6770-3762-7116	39.350.325.000
4	23-05-2025	SP DIPA-032.05.2.325156/2025	DS:0210-6281-7490-5093	39.350.325.000
5	14-07-2025	SP DIPA-032.05.2.325156/2025	DS:9562-2497-1280-8492	39.350.325.000
6	15-10-2025	SP DIPA-032.05.2.325156/2025	DS:9562-2497-1280-8492	39.350.325.000
7	19-11-2025	SP DIPA-032.05.2.325156/2025	DS: :9034-9353-6148-1040	39.350.325.000
8	11-12-2025	SP DIPA-032.05.2.325156/2025	DS: 9034-9353-6148-1040	39.350.325.000
9	26-12-2025	SP DIPA-032.05.2.325156/2025	DS: 9034-9353-6148-1040	39.350.325.000

- Revisi DIPA ke 01 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA- 032.05.2.325156/2025 Tanggal 21 Februari 2025, kode Digital Stamp (DS) : 8410-4864-8065-0016 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 39.350.325.000. Revisi tersebut merupakan revisi DJA untuk Alokasi Blokir dalam rangka efisiensi

anggaran (belanja modal, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja keperluan perkantoran, dll) dan RO Cadangan (anggaran tidak tertampung di RO Teknis karena indeks SBKK) dengan nilai total Rp. 17.377.097.000.

- Revisi DIPA ke 02 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2025 Tanggal 24 Maret 2025, kode Digital Stamp (DS) : 0261-3019-9074-7414 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 39.350.325.000. Revisi tersebut merupakan revisi DJA untuk memindahkan anggaran dari RO Cadangan ke RO SBK yang sudah mendapatkan persetujuan pelampauan SBK dari Kementerian Keuangan.
- Revisi DIPA ke 03 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2025 Tanggal 14 April 2025, kode Digital Stamp (DS) : 6531-6770-3762-7116 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 39.350.325.000. Revisi tersebut merupakan revisi DJA dalam rangka relaksasi efisiensi anggaran untuk Buka Blokir Anggaran (belanja modal, belanja pemeliharaan dan belanja keperluan perkantoran, dll) senilai Rp. 6.080.463.000 serta Pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan II.
- Revisi DIPA ke 04 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2025 Tanggal 23 Mei 2025, kode Digital Stamp (DS) : 0210-6281-7490-5093 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 39.350.325.000. Revisi tersebut merupakan dalam rangka relaksasi efisiensi anggaran untuk Buka Blokir Anggaran (operasi kapal pengawas sumber dana PNBK dan belanja barang lainnya) senilai Rp. 4.088.585.000.
- Revisi DIPA ke 05 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2025 Tanggal 14 Juli 2025, kode Digital Stamp (DS) : 9562-2497-1280-8492 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 39.350.325.000. Revisi tersebut

merupakan dalam rangka relaksasi efisiensi anggaran untuk Buka Blokir Anggaran (operasi kapal pengawas).

- Revisi DIPA ke 06 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2025 Tanggal 15 Oktober 2025, kode Digital Stamp (DS) : 9562-2497-1280-8492 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 39.350.325.000. Revisi tersebut dalam rangka Buka Blokir Anggaran (Program Dukungan Manajemen).
- Revisi DIPA ke 07 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2025 Tanggal 19 November 2025, kode Digital Stamp (DS) : 9034-9353-6148-1040 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 39.350.325.000. Revisi tersebut dalam rangka mengganti anggaran yang terkena kode blokir A menjadi PNBK di RO Operasional Kapal Pengawas.
- Revisi DIPA ke 08 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2025 Tanggal 11 Desember 2025, kode Digital Stamp (DS) : 9034-9353-6148-1040 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 39.350.325.000. Revisi tersebut dalam rangka buka blokir pada Program Dukungan Manajemen MAK 2355.002 dan penambahan pagu anggaran pada MAK 2355.001.
- Revisi DIPA ke 09 DIPA Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Batam (325156) Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2025 Tanggal 26 Desember 2025, kode Digital Stamp (DS) : 9034-9353-6148-1040 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp. 39.350.325.000. Revisi tersebut merupakan Pemutakhiran POK sebagai dukungan LLAT Tahun 2025.

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp. 63,869,772 .

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 63,869,772 atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0 Pendapatan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Denda Penyelesaian pekerjaan Pemerintah	-	0	100,00%
Pendapatan Penjualan Alsln	-	8.488.000	100,00%
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	46.362.472	100,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	9.019.300	100,00%
Jumlah	-	63.869.772	100,00%

Adapun Rincian Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Januari 2025 senilai Rp. 4,033,834 dengan Nomor NTPN : 6C99661QVD2O20AN tanggal 18 Maret 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP.14/Lan.2/TU.410/I/2025 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
2. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Februari 2025 senilai Rp. 4,033,834 dengan Nomor NTPN : 88B2A61QVD8PQB52 tanggal 21 Mei 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP.14/Lan.2/TU.410/I/2025 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
3. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Maret 2025 senilai Rp. 4,033,834 dengan Nomor NTPN : E614C48VVO6HAC08

tanggal 5 Juni 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 50/Lan.2/TU.410/III/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;

4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama AMRI SEPTIADI, dengan Nomor NTPN : 419AB55DFIMHSG7G tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp. 140,600;
5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ADIE WIJAYA, dengan Nomor NTPN : DB88D1JNG8D085BH tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 210,900;
6. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ALFIANI HASAN, dengan Nomor NTPN : 8412F2G502VCMJH3 tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
7. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ALIEM WIJAYA, dengan Nomor NTPN : E59C71JNG8D087F7 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 210,190;
8. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ALIZAR, dengan Nomor NTPN : 0FA2948VVO45GMJ6 tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 35,000;

9. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ANDI IRVAN TAUFAN AMAL ,dengan Nomor NTPN : CBCD42G502VI4436 tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 105,450;
10. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ARI MUHANSOR, dengan Nomor NTPN : 7B3FC3CIFTHP3QDF tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
11. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ANTON SUANDA, dengan Nomor NTPN : BEB162G502VCKS1L tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 105,450;
12. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ARDIANSYAH, dengan Nomor NTPN : E8B4961QVD8U8QQS tanggal 29 Mei 2024 senilai Rp. 210,900;
13. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ARDIANSYAH KURNIAWAN, dengan Nomor NTPN : 0B4D861QVD8UAI7B tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
14. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ARUMWATI, dengan Nomor NTPN : 0D00E7QLV2DN3N0M tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 105,450;

15. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama BUDI SANTOSO, dengan Nomor NTPN : EF95561QVD8U97FM tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 281,200;
16. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama BUKHARI, dengan Nomor NTPN : DC7921JNG8D07NL7 tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 316,350;
17. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama DEA MUTIARA NABILLA, dengan Nomor NTPN : D572055DFIMFQ32D tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 175,750;
18. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama DIAN PRAWIDO A. SITEPU, dengan Nomor NTPN : 63BC80NA0DQJQH3F tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 455,000;
19. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama DINDA TRIMUDYA, dengan Nomor NTPN : B2DD02G502VCKUFL tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 140,600;
20. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama FABRIANSYAH ADRIANTO, dengan Nomor NTPN : B64C30NA0DSTB8GA tanggal 3 Juni 2024 senilai Rp. 281,200;

21. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama FAHRUR ROZI, dengan Nomor NTPN : 5208055DFIMK5S2V tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 316,350;
22. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama FIRMAN KODRATO, dengan Nomor NTPN : 7E96D55DFIMHTEIG tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
23. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama FITRIA ANGGRAINI, dengan Nomor NTPN : 4FBA50NA0DQJQSAU tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 105,450;
24. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama GLEN EVAND, dengan Nomor NTPN : BB2FA1JNG8D08LVO tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 246,050;
25. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HADI PUSPITO, dengan Nomor NTPN : 8FB513CIFTHP3MGO tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 70,300;
26. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HAFID ALFAJRI, dengan Nomor NTPN : 96ACA61QVD8UAG5N tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

27. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HARPANDI, dengan Nomor NTPN : 636A50NA0DQJSMHV tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
28. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HASNUL BARKI, dengan Nomor NTPN : 9CA8D55DFIMHS3OR tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp175,750;
29. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HENGKY MANURUNG, dengan Nomor NTPN : 8334E0NA0DQJR1TU tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 210,900;
30. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HERI SETIAWAN, dengan Nomor NTPN : 641143CIFTHP1V3S tanggal 1 Juni 2024 senilai Rp. 105,450;
31. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HIBRID RIZKIYANU, dengan Nomor NTPN : A79582G502VCKE93 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 665,000;
32. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama INDAH KESUMA A, dengan Nomor NTPN : 340836U8F7RANI7V tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

33. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama IWAN SISWANDI, dengan Nomor NTPN : 04D2D1JNG8D09QF7 tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
34. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama JAKI MOCHTAR, dengan Nomor NTPN : 00ED961QVD8UAIDS tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
35. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama JIMMY BELUNG, dengan Nomor NTPN : E497161QVD8UAJK2 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
36. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama JUNET F.M. AMBARITA, dengan Nomor NTPN : E79E07QLV2DN4I5L tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
37. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama KORI APRIYANTO, dengan Nomor NTPN : 05A2D48VVO45FBTV tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 246,050;
38. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama KOTOT SETIADI, dengan Nomor NTPN : 30B2055DFIMHSA6J tanggal 29 Mei 2024 senilai Rp. 175,750;

39. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama LUTFI FELANIE, dengan Nomor NTPN : 82ACA7QLV2DPDMH9 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 140,600;
40. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama MAPUTRA PRASETYO, dengan Nomor NTPN : E39E455DFIMHS0HT tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 175,750;
41. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama MISDI, dengan Nomor NTPN : DF4F555DFIMHSIUR tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 69,700;
42. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama MUHAMMAD AFIF, dengan Nomor NTPN : E43550NA0DQJQVUN tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 210,900;
43. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama MUSLANI, dengan Nomor NTPN : 2C0D255DFIMHRDAR tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 104,550;
44. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama PRIHANDOKO, dengan Nomor NTPN : 2805B1JNG8D089JU tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 175,750;

45. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama RIDHO ILAHI, dengan Nomor NTPN : 6320C6U8F7RANQGA tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 35,000;
46. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ROBIYANTO TANUM, dengan Nomor NTPN : 717BE0NA0DQJSFVB tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 70,300;
47. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ROZALI, dengan Nomor NTPN : BB36D61QVD8UAEJN tanggal 30 Mei 2024 senilai Rp. 70,300;
48. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ROZI DETA SURINA, dengan Nomor NTPN : 79F331JNG8D07K1B tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp. 350,000;
49. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SABRAN OKTA, dengan Nomor NTPN : E4C743CIFTHP2GKQ tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 140,600;
50. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SAIFUL ANAM, dengan Nomor NTPN : E01656U8F7RANR4E tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

51. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SATRIA RAMADHAN, dengan Nomor NTPN : F247948VVO45F5AN tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 246,050;
52. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SEIVO GREVO WEWENKANG, dengan Nomor NTPN : 06CD30NA0DQJQOFH tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 281,200;
53. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SENTANU BEKTI S.F., dengan Nomor NTPN : D9ADE55DFIMHRFAA tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 455,000;
54. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SYAHRIL, dengan Nomor NTPN : 547842G502VCMJI9 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
55. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama TRI CAHYONO, dengan Nomor NTPN : 0EEBD61QVD8UAMGU tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 70,300;
56. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama TRI WARNI, dengan Nomor NTPN : E719548VVO6EV9A2 tanggal 3 Juni 2024 senilai Rp. 140,600;

57. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama TURMAN HARDIANTO MAHA, dengan Nomor NTPN : 4761A2G502VCO756 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 313,650;
58. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama VINA MAIRA SARI, dengan Nomor NTPN : 83AA87QLV2DN4QC7 tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
59. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama WIDODO, dengan Nomor NTPN : 48F0E0NA0DQJSJFE tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
60. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama YASIR MAULANA, dengan Nomor NTPN : D10F30NA0DQJQM0N tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 350,000;
61. Pendapatan dari Penjualan Alat dan Mesin senilai Rp. 8,488,000 dengan Nomor NTPN : 3F4466U8F86IE8SO tanggal 3 September 2025. Sesuai Risalah Lelang Nomor : 282/03.04/2025-01 berupa 1 (satu) paket scrap alat angkutan berupa Speed Boat/Motor Tempel dan Rubber Boat;
62. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan April 2025 senilai Rp. 4,033,834 dengan Nomor NTPN : E7FD23CIFTNA46F4 tanggal 11 Oktober 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 50/Lan.2/TU.410/III/2025

tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;

63. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Mei 2025 senilai Rp. 3,522,950 dengan Nomor NTPN : E475B3CIFTT56LG8 tanggal 8 September 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 64/Lan.2/TU.410/V/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
64. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Juni 2025 senilai Rp. 3.778.392 dengan Nomor NTPN : D84FC0NA0E920BOQ tanggal 17 Oktober 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 64/Lan.2/TU.410/V/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
65. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Juli 2025 senilai Rp. 3.778.392 dengan Nomor NTPN : F4B4E0NA0EEO8IRG tanggal 8 Desember 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 64/Lan.2/TU.410/V/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
66. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Agustus 2025 senilai Rp. 3.778.392 dengan Nomor NTPN : A64C08N3ETK7VC3L tanggal 8 Desember 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 64/Lan.2/TU.410/V/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
67. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan September 2025 senilai Rp. 4.033.834 dengan Nomor NTPN : A93C02G503JP25T3 tanggal 17 Desember 2025. Sesuai Surat

Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP.124/Lan.2/TU.410/IX/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;

68. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Oktober 2025 senilai Rp. 4.033.834 dengan Nomor NTPN : 35DC33CIFU65G2SA tanggal 17 Desember 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP.124/Lan.2/TU.410/IX/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;

69. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan November 2025 senilai Rp. 3.778.392 dengan Nomor NTPN : 8B1B03CIFU66J9QO tanggal 18 Desember 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 64/Lan.2/TU.410/V/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;

70. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Desember 2025 senilai Rp. 3.522.950 dengan Nomor NTPN : B7D806U8F8FSF53J tanggal 15 Desember 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 248 /Lan.2/TU.410/XII/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025.

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp. 33,488,956,233*

Realisasi Belanja instansi TA 2025 adalah sebesar Rp. 33,488,956,233 atau 94,83 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 35,312,927,000 . Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	13.541.999.000	13.541.111.573	99,99
Belanja Barang	21.626.057.000	19.802.984.600	91,57
Belanja Modal	144.871.000	144.860.060	99,99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	35.312.927.000	33.488.956.233	94,83

Dibandingkan dengan TA 2024, realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 41,17 % dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan 0,26 % disebabkan adanya penambahan pegawai ASN (pengangkatan PPPK baru) sebanyak 23 orang lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Menurunnya realisasi belanja barang sebesar 47,50 % dan belanja modal sebesar 97,46 % disebabkan perbedaan pagu anggaran belanja barang dan modal tahun anggaran 2025 yang jauh lebih kecil dibanding tahun anggaran 2024 adanya efisiensi anggaran sehingga menyebabkan sebagian belanja barang dan modal dilakukan blokir.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	13.541.111.573	13.506.510.383	0,26
Belanja Barang	19.802.984.600	37.716.775.794	(47,50)
Belanja Modal	144.860.060	5.701.575.017	(97,46)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	33.488.956.233	56.924.861.194	(41,17)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025,

pada Pangkalan PSDKP Batam terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 2, 5 dan 8 dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2025. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing–masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 2 : memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 4 kegiatan prioritas, yang tersebar di Pangkalan PSDKP Batam dengan pagu mencapai Rp. 15,252,589,000 dan realisasi sebesar Rp. 13,740,266,183 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN			
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%
2350 .QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	12.880.420.000	11.371.954.324	88,29				
2350 .QHD .001	Operasi Kapal Pengawas	12.446.701.000	10.938.378.329	87,88	Operasi	62	75	120,97
2350 .QHD .003	Operasi Speedboat Pengawas	433.719.000	433.575.995	99,97	Operasi	10	18	180,00
2350 .RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.632.819.000	1.632.755.891	100,00				
2350 .RCG .001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	1.632.819.000	1.632.755.891	100,00		15	15	100,00
2352 .QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	739.350.000	735.555.968	99,49				
2352 .QIC .001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	320.615.000	318.720.706	99,41	Lembaga	95	174	183,16
2352 .QIC .002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	418.735.000	416.835.262	99,55	Lembaga	30	126	420,00
TOTAL		15.252.589.000	13.740.266.183	288	-			

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.13,541,111,573

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 13,541,111,573 dan Rp. 13,510,311,000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus PPPK sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 diperuntukkan bagi ASN (PNS dan PPPK Pangkalan PSDKP Batam yang berjumlah 103 orang Belanja pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,26 persen dari TA 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	3.951.744.800	4.215.344.000	(6,25)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	58.669	70.394	(16,66)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	330.869.750	365.446.740	(9,46)
Belanja Tunj. Anak PNS	104.523.996	114.913.244	(9,04)
Belanja Tunj. Struktural PNS	30.060.000	26.280.000	14,38
Belanja Tunj. Fungsional PNS	149.170.000	154.255.000	(3,30)
Belanja Tunj. PPh PNS	20.307.695	23.160.400	(12,32)
Belanja Tunj. Beras PNS	250.935.300	281.713.800	(10,93)
Belanja Uang Makan PNS	399.522.000	319.227.000	25,15
Belanja Tunjangan Umum PNS	119.885.000	138.610.000	(13,51)
Belanja Gaji Pokok PPPK	969.815.300	743.003.200	30,53
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.743	16.141	9,93
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	66.286.410	44.665.960	48,40
Belanja Tunjangan Anak PPPK	14.192.156	9.968.308	42,37
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	59.100.000	66.960.000	(11,74)
Belanja Tunjangan Beras PPPK	62.932.980	45.841.860	37,28
Belanja Uang Makan PPPK	81.618.000	30.193.000	170,32
Belanja Tunjangan Umum PPPK	20.590.000		100,00
Belanja Uang Lembur	251.320.000	289.170.000	(13,09)
Belanja Uang Lembur PPPK	67.746.000	16.630.000	307,37
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	5.366.876.233	5.712.085.700	(6,04)
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.223.539.597	912.733.320	34,05
Jumlah Belanja Kotor	13.541.111.629	13.510.288.067	0,23
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	-56	-2.962	(98,11)
Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	-710.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	-703.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	-2.170.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	-58	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	-191.664	(100,00)
Jumlah Belanja	13.541.111.573	13.506.510.383	0,26

Penjelasan untuk Pengembalian Belanja Pegawai yaitu Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS senilai Rp. 56 merupakan pengembalian belanja pembulatan yang di potong melalui SPM kekurangan gaji PNS .

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2025 adalah sebesar Rp. *Rp. 19,802,984,600* dan TA 2024 adalah Rp. 37,716,775,794.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	3.715.514.978	3.874.006.359	(4,09)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	190.988.100	381.576.566	(49,95)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.631.833	14.806.900	(68,72)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	143.640.000	133.842.000	7,32
Belanja Barang Operasional Lainnya	305.948.500	422.117.000	(27,52)
Belanja Bahan	9.412.819.977	16.573.028.025	(43,20)
Belanja Honor Output Kegiatan	61.400.000	122.200.000	(49,75)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	701.983.610	1.449.872.015	(51,58)
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.839.400	35.111.000	(94,76)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	67.492.227	314.578.388	(78,55)
Belanja Langganan Listrik	953.108.677	919.901.239	3,61
Belanja Langganan Telepon	191.027.797	224.013.991	(14,73)
Belanja Langganan Air	205.449.788	166.985.188	23,03
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5.401.263	9.125.869	(40,81)
Belanja Sewa	85.254.000	306.028.000	(72,14)
Belanja Jasa Profesi	0	52.800.000	(100,00)
Belanja Jasa Lainnya	371.853.220	876.645.102	(57,58)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	325.333.000	524.246.286	(37,94)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.623.006.095	3.792.050.875	(57,20)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.710.000	1.399.213.206	(92,87)
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	56.646.500	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Jaringan	53.875.016	-	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	972.455.460	4.428.706.708	(78,04)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	310.251.659	723.235.000	(57,10)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	391.134.367	(100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	525.223.028	(100,00)
Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	-60.030	(100,00)
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	-257.788	(100,00)
JUMLAH BELANJA	19.802.984.600	37.716.775.794	-47,50

Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami Penurunan 47,50 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini antara lain disebabkan

karena persentase pagu anggaran Belanja Barang TA 2024 lebih besar dibandingkan TA 2025 serta adanya efisiensi anggaran sehingga terdapat belanja barang yang di blokir. Selain itu, pada TA 2025 tidak terdapat pengembalian Belanja Barang.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp. 144.860.060

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 144.860.060 dan Rp. 5.701.575.017. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan sebesar 97,46 % dibandingkan TA 2024 dikarenakan pada TA 2025 pagu Belanja Modal lebih sedikit dibanding TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.660.060	1.540.605.250	-93,79%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	2.276.160.900	-100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	197.198.160	-100,00%
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	14.434.500	-100,00%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	1.388.743.007	-100,00%
Belanja Modal Jaringan	49.200.000	284.433.200	-82,70%
Jumlah Belanja	144.860.060	5.701.575.017	-97,46%

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp. 0

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Hal ini disebabkan tidak ada pengadaan tanah pada TA 2025.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp. 95,660,060*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 95,660,060 dan Rp. 1,540,605,250. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami penurunan sebesar 89,80 % persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 disebabkan dikarenakan pada TA 2025 pagu Belanja Modal lebih sedikit dibanding TA 2024 dalam rangka efisiensi anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.660.060	1.540.605.250	-93,79%
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Alsin	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Alsin	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	95.660.060	1.540.605.250	-93,79%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	95.660.060	1.540.605.250	-93,79%

Detai Pembelian Alsin pada 2025 sebagai Berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Pompa Air	1	Buah	6.850.000
2	Lemari Besi/Metal	1	Buah	2.357.000
3	Meja Kerja Kayu	3	Buah	5.377.060
4	Kursi Fiber Glas/Plastik	23	Buah	31.556.000
5	Sofa	6	Buah	9.126.000
6	A.C. Split	1	Buah	9.690.000
7	Dispenser	1	Buah	5.420.000
8	Camera Under Water	1	Buah	2.640.000
9	Handy Talky (HT)	4	Buah	22.644.000
Total		41	Buah	95.660.060

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp. 0*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 323,946,554. Hal ini disebabkan tidak ada Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2025 karena adanya efisiensi anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan	-	-	-
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	323.946.554	100,00%
Jumlah Belanja Kotor	0	323.946.554	100,00%
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	323.946.554	100,00%

B.5.4 Belanja Modal Jalan Jembatan dan Jaringan

*Belanja Modal
Jalan, Jembatan
dan Jaringan
Rp. 49,200,000*

Realisasi Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 49,200,000 dan Rp. 284,433,200. Belanja modal jaringan di Pangkalan PSDKP Batam pada TA 2025 adalah sebagai berikut :

- Belanja Modal Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil senilai Rp. 24,496,000 berupa perbaikan instalasi air dari Bak Air Kantor ke Mess Operator dan DTC. Belanja Modal Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil senilai Rp. 24,496,000 kemudian dilakukan koreksi pencatatan menjadi belanja pemeliharaan non asset, dikarenakan pada awalnya tercatat menjadi belanja asset. Hal tersebut telah dikoreksi berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Nomor : B.2788/PSDKPLan.2/PL.750/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

- Belanja Modal Instalasi Air Permukaan senilai Rp. 49,200,000 berupa pembayaran belanja modal berupa pengadaan instalasi air dari PT. MGGS untuk instalasi air bersih kapal pengawas ke dermaga kantor sesuai dengan Invoice No:2025/TPA-DKP/06/INV-0002 Tgl 01 Juni 2025.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

*Belanja Modal
Lainnya
Rp. 0*

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Tidak terdapat Belanja Modal lainnya pada TA 2025 di Pangkalan PSDKP Batam diakrenakan efisiensi anggaran.

B.5.6 Belanja Bantuan Sosial

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial pada TA 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024

Unit Kerja/ Jenis Pengembalian	NTPN/ Tanggal Bayar	Nilai (Rp)
Pangkalan PSDKP Batam (TUP) Kas Bank	8911C2CPTEMU7N1S/ 30 Desember 2025	657.004.188
Satwas SDKP Natuna (PTUP) Kas Bank	C147A0JUTPHIAI7C/ 28 Desember 2025	2.000
Satwas SDKP Natuna (PTUP) Tunai	6D9CB45KT3R3UIIC/ 29 Desember 2025	8.000
Satwas SDKP Natuna (PTUP) Tunai	824625UFISOVSOIIM/ 29 Desember 2025	307.000
Pangkalan PSDKP Batam (GUP) Tunai	55A3E522CUE3EN1L/ 30 Desember 2025	66.006
Satwas SDKP Anambas (GUP) Kas Bank	C138645KT3R3UI50/ 28 Desember 2025	1.205
Satwas SDKP Anambas (GUP) Tunai	2D1062CPTEMB4IJ9/ 29 Desember 2025	1,000
Unit Kerja/ Jenis Pengembalian	NTPN/ Tanggal Bayar	Nilai (Rp)
Satwas SDKP Belitung (GUP) Kas Bank	1FE8445KT3R3UI5A/ 28 Desember 2025	10.000
Satwas SDKP Tj. Pinang (GUP) Tunai	73D4B8JOC8N1VIIT/ 28 Desember 2025	27.147
Wilker PSDKP Moro (GUP) Kas Bank	41B987NASE4LII4G/ 28 Desember 2025	11.100
Wilker PSDKP Moro (GUP) Tunai	38D5C6QTCJI95IJK/ 29 Desember 2025	36.200

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Mutasi Tambah :		
Kas di Brankas	-	-
Kas di Rekening	-	-
BP UM (Voucher)	-	-
BP BPP	-	-
Kwitansi UP belum di SPJ-kan	-	-
Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	-	-
Jumlah	-	-

Terdapat Pengembalian UP dan TUP dengan rincian sebagai berikut :

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang Tunai	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.C.4 Piutang PNB/Piutang Lainnya

*Piutang
PNBP/Piutang
Lainnya
Rp. 0*

Saldo Piutang PNB/Piutang Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0.

C.C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp. 0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.
0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum
diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo
dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal
pelaporan.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar
TPA
Rp. 0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per
tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-
masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA
merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu
12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp. 0*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31
Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0
dan Rp. 0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar
adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang

lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur

C.8 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka
Rp 0*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 4,818,750. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja dibayar dimuka di I TA 2024 sudah di jurnal balik di TA 2025.

C.9 Uang Muka Belanja (Prepayment)

*Uang Muka
Belanja
(Prepayment)*

Saldo uang muka belanja per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka Belanja (Prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Belanja Dibayar
di Muka
Rp 0*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.11 Persediaan

*Persediaan
Rp.
845,875,210*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 845,875,210 dan Rp. 1,478,974,439.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

JENIS	TA 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	38.470.510	14.512.500
Suku Cadang	807.404.700	1.464.461.939
Bahan Baku (BBM)	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	845.875.210	1.478.974.439

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp. 38,470,510 Suku Cadang Senilai Rp. 807,404,700 Untuk rincian persediaan terlampir. Adapun rincian Mutasi Tambah dan Kurang Persediaan yaitu :

Saldo Nilai Persediaan per 31 Desember 2024	1.478.974.439
Mutasi tambah:	
Pembelian Persediaan	67.492.227
Pembelian Suku Cadang	99.710.000
Hasil Opname Fisik	49.241.315
Reklasifikasi Masuk	-
Tranfer Masuk	-
Pendapatan Persediaan	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	
Beban Persediaan Konsumsi	- 43.534.217
Beban Persediaan suku cadang	- 255.980.890
Transfer Keluar	- 550.027.664
Saldo per 31 Desember 2025	845.875.210

Neraca Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Persediaan 31 Desember 2025 (Saldo Awal 2025)	1.478.974.439
Realisasi Belanja persediaan	67.492.227
Realisasi Belanja Suku Cadang	99.710.000
Hasil Opname Fisik	49.241.315
Reklasifikasi Masuk	-
Total Realisasi Persediaan	1.695.417.981
Beban Persediaan konsumsi	43.534.217
Beban persediaan suku cadang	255.980.890
Reklasifikasi Keluar	-
Transfer Keluar	550.027.664
Total beban persediaan	849.542.771
Selisih	845.875.210
Neraca 31 Desember 2025	845.875.210
Selisih	-
Klarifikasi selisih	Nilai
Beban penyesuaian nilai persediaan	-
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	-
Klarifikasi selisih beban persediaan	-

C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tagihan
TP/TGR
Rp. 0*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.13 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Rp. 0 Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp. 0 Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.15 Tanah

Tanah Rp. 36,787,450,219 Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 36,787,450,219 dan Rp. 35,080,558,219 terdapat transfer masuk senilai Rp. 1,706,892,000 pada TA 2025 berupa penambahan nilai Tanah Bangunan Laboratorium gedung sebesar 701 m² dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang berdasarkan BAST BMN Nomor : B.440/SKIPM.PLB/PL.450/VIII/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025.

Tabel Uraian Saldo per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	35.080.558.219
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	0
Pengembangan Melalui KDP	0
Tranfer Masuk	1.706.892.000
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 30 September 2025	36.787.450.219

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2025

NO	LUAS	KOTA/ KABUPATEN	PROVINSI	NILAI PEROLEHAN
1	999	KAB. BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	622.877.000
2	595	KAB. BELITUNG TIMUR	BANGKA BELITUNG	247.710.000
3	896	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	JAMBI	192.640.000
4	25.497	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	4.559.086.500
5	1.330	KAB. BELITUNG	BANGKA BELITUNG	166.638.907
6	6.944	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU	1.339.879.712
7	2.922	KAB. KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	5.668.680.000
8	19.381	KAB. NATUNA	KEPULAUAN RIAU	18.654.213.000
9	1.572	KAB. KARIMUN	KEPULAUAN RIAU	3.076.404.000
10	360	KOTA TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	552.429.100
11	701	KOTA PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	1.706.892.000
				36.787.450.219

C.16 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp.
77,892,252,696

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 77,892,252,696 dan Rp. 102,907,860,249 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	102.907.860.249
Mutasi tambah:	
Pembelian	95.660.060
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Pengembangan Nilai Aset Langsung	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	3.176.478.297
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(464.562.800)
Koreksi Pencatatan	0
Transfer Keluar	(27.823.183.110)
Reklasifikasi Keluar	0
Aset Ekstrakomtabel	0
Saldo per 31 Desember 2025	77.892.252.696
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025	-49.546.304.523
Nilai Buku per 31 Desember 2025	28.345.948.173

Mutasi tambah peralatan dan mesin berupa :

1. Pembelian peralatan dan mesin senilai total Rp. 95,660,060 berupa :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Pompa Air	1	Buah	6.850.000
2	Lemari Besi/Metal	1	Buah	2.357.000
3	Meja Kerja Kayu	3	Buah	5.377.060
4	Kursi Fiber Glas/Plastik	23	Buah	31.556.000
5	Sofa	6	Buah	9.126.000
6	A.C. Split	1	Buah	9.690.000
7	Dispenser	1	Buah	5.420.000
8	Camera Under Water	1	Buah	2.640.000
9	Handy Talky (HT)	4	Buah	22.644.000
Total		41	Buah	95.660.060

2. Transfer masuk berdasarkan BAST BM Nomor : B.440/SKIPM.PLB/PL.450/VIII/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025 berupa alat Kantor dan Rumah Tangga dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan

Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang yaitu 1 Unit Papan Visual dengan nilai Rp. 6.729.500;

- Transfer masuk berdasarkan BAST Nomor : B.646/DJPSDKP.1/PL.450/XII/2025 pada tanggal 31 Desember 2025 berupa Drone (ROV SKYRO RO Drone Bawah Air) senilai Rp. 3.169.748.797;

Mutasi kurang peralatan dan mesin berupa:

- Transfer keluar KP. HIU 05 sesuai dengan BAST Nomor : B.7/PSDKPLan.2/PL.510/I/2025 tanggal 1 Januari 2025 dari Pangkalan PSDKP Batam ke Pangkalan PSDKP Lampulo. Rincian asset intrakomptabel yang di transfer keluar ke Pangkalan PSDKP Lampulo dengan total nilai Rp. 27,823,183,110 adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Kapal Patroli Pantai	1	Unit	26.044.915.000
2	Alat Selam Seet	4	Buah	33.875.600
3	P.C Unit	1	Buah	6.615.400
4	Note Book	5	Buah	77.333.200
5	Alat Dapur Lainnya	3	dummy	5.262.200
6	Kursi Besi/Metal	2	Buah	41.500.000
7	Radar Lainnya	1	dummy	371.250.000
8	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	6.900.000
9	Buffet	2	Buah	18.997.000
10	Lemari Es	2	Buah	5.859.500
11	Perkakas Bengkel Kerja Lainnya	3	dummy	13.496.000
12	Alat Komunikasi Radio VHF Lainnya	6	dummy	31.555.000
13	Mesin Pompa air PMK	1	Buah	1.469.000
14	Tool Kit Set	1	Buah	3.233.600
15	Teropong/Keker	1	Buah	9.500.000
16	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	24.000.000
17	Peta	1	Buah	323.649.000
18	Home Theater	2	Buah	14.000.000

19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Buah	6.945.850
20	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1	dummy	77.000.000
21	Alat Rumah Tangga Lainnya	17	dummy	21.046.850
22	Handy Cam	1	Buah	6.620.000
23	Pompa Celup	2	Buah	10.989.000
24	A.C. Split	5	Buah	23.153.000
25	Camera Digital	1	Buah	9.353.000
26	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	Buah	2.950.000
27	Lemari Kayu	4	Buah	21.747.000
28	Sirine	1	Buah	24.480.000
29	Televisi	4	Buah	20.369.600
30	Uninterrupted Power Supply (UPS)	3	Buah	10.950.000
31	Kunci Moment	1	Buah	6.880.000
32	Peralatan Las Listrik	2	Buah	9.688.200
33	Mesin Blower Listrik / Mekanik	1	Buah	5.000.000
34	Alat Ukur Lainnya	1	dummy	1.760.000
35	Mesin Pengering Pakaian	1	Buah	5.400.000
36	Mesin Absensi	1	Buah	7.953.000
37	Pompa Air	2	Unit	9.038.500
38	Tool Kit Box	1	Buah	4.474.800
39	Mesin Gerinda	1	Buah	1.943.310
40	Amplifier	1	Buah	7.370.000
41	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	1	dummy	2.673.000
42	Non Senjata Api Lainnya	1	dummy	84.400.000
43	Secondary Surveillance Radar	1	Buah	148.650.000
44	Mesin Cuci	2	Buah	16.651.200
45	Handy Talky (HT)	6	Buah	14.256.000
46	Compressor Udara	1	Buah	98.000.000
47	Kitchen Set	1	Buah	22.000.000
48	Teropong (Optik)	1	Buah	3.550.000
49	Reach In Frezzer	2	Buah	8.014.600
50	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	Buah	3.960.000

51	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Buah	5.505.400
52	Lemari Besi/Metal	2	Buah	7.000.000
53	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	dummy	6.549.000
54	GPS Receiver	1	Buah	9.006.300
55	Telepon Satelit	1	Buah	21.500.000
56	Sepeda Motor	1	Unit	14.500.000
57	Peralatan Komputer Lainnya	1	dummy	1.671.000
58	Sice	2	Buah	26.774.000
TOTAL				27.823.183.110

5. Penghentian Aset Dari Penggunaan berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Nomor : B.4278/PSDKPLan.2/PL.450.XII /2025 tanggal 12 Desember 2025 senilai Rp. 464.562.800 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	NILAI PEROLEHAN
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	Unit	374.500.000
2	Rol Meter	20	Buah	7.095.000
3	Alat Ukur Lainnya	4	dummy	11.825.000
4	Mesin Absensi	2	Buah	5.300.000
5	LCD Projector/Infocus	2	Buah	20.622.800
6	Meja Kerja Kayu	6	Buah	14.370.000
7	Kursi Besi/Metal	18	Buah	12.749.000
8	Meja Rapat	5	Buah	7.145.000
9	Lemari Es	3	Buah	4.970.000
10	A.C. Split	2	Buah	5.986.000
11	Life Jacket	4	Buah	400.000
TOTAL				464.562.800

C.17 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp. 40,531,410,504*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah adalah Rp. 40,531,410,504 dan Rp. 39,370,536,307. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	39.370.536.307
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Transfer Masuk	1.160.874.197
Pengembangan dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Revaluasi BMN	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	40.531.410.504
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-10.472.936.651
Nilai Buku per 31 Desember 2025	30.058.473.853

Terdapat transfer masuk senilai Rp. 1,160,874,197 untuk Gedung dan Bangunan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada periode TA 2025 berupa Gedung Laboratorium Permanen sebanyak 1 unit dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang berdasarkan BAST BMN Nomor : B.440/SKIPM.PLB/PL.450/ VIII/ 2025 pada tanggal 15 Agustus 2025.

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp. 39.642.902.775*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 39.642.902.775 dan Rp. 39,471,257,775 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	39.471.257.775
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	122.445.000
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-
Belanja Modal Jaringan	73.696.000
Belanja Pemeliharaan Jaringan	-
Pengembangan Nilai Aset langsung Jaringan	-
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	-
Mutasi kurang:	-
Revaluasi BMN	-
Transfer Keluar	-
Koreksi Pencatatan	(24.496.000)
Saldo per 31 Desember 2025	39.642.902.775
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-33.320.247.095
Nilai Buku per 31 Desember 2025	6.322.655.680

Terdapat mutasi tambah dan berupa transfer masuk Jaringan dan Irigasi dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang berdasarkan BAST BMN Nomor : B.440/SKIPM.PLB/PL.450/VIII/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025 dengan nilai masing-masing Rp. 120,000,000 dan Rp. 2,445,000. Selain itu terdapat Belanja modal jaringan berupa Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil dan Instalasi Air Permukaan Lainnya dengan nilai masing-masing Rp. 24,496,000 dan Rp. 49,200,000 pada periode TA 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil senilai Rp. 24,496,000 berupa perbaikan instalasi air dari Bak Air Kantor ke Mess Operator dan DTC. Belanja Modal Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil senilai Rp. 24,496,000 kemudian dilakukan koreksi pencatatan menjadi belanja pemeliharaan non asset, dikarenakan pada awalnya tercatat menjadi belanja asset. Hal tersebut telah dikoreksi berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Nomor : B.2788/PSDKPLan.2/PL.750/ VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

- Belanja Modal Instalasi Air Permukaan senilai Rp. 49,200,000 berupa pembayaran belanja modal berupa pengadaan instalasi air dari PT. MGGS untuk instalasi air bersih kapal pengawas ke dermaga kantor sesuai dengan invoice No:2025/TPA-DKP/06/INV-0002 Tgl 01 Juni 2025.

C.19 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0 dan Rp. 0.

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp. 0*

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi kurang atas KDP ini untuk Tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	0
Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	0
Alsin dalam Pengerjaan	0
Pengembangan KDP	0
Perolehan Lainnya KDP	0
Perolehan/Penambahan KDP Gedung Bangunan	0
Mutasi kurang:	0
Pengembangan Melalui KDP	0
Koreksi Nilai KDP	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Hibah (Keluar)	0
Saldo per 30 Juni 2025	0

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang untuk Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada periode TA 2025.

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset
Tetap
Rp
(76,567,288,223)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah Rp. (76,567,288,223) dan 31 Desember 2024 adalah Rp. (99,325,603,705). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025

NO	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	77.892.252.696	49.546.304.523	28.345.948.173
2	Gedung dan Bangunan	40.531.410.504	10.472.936.651	30.058.473.853
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.642.902.775	20.570.415.432	19.072.487.343
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		158.066.565.975	80.589.656.606	77.476.909.369

C.22 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

C.23 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp0*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Terdapat mutasi tambah Berupa Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp.0.

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.25 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp. 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN :

Uang Persediaan	0
Tambahan Uang Persediaan	0

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp. 13,460,588*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 13,460,588 dan Rp. 72,947,699. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 adalah:

1.Tagihan listrik Bulan Desember 2025 yang terbit tagihannya dan harus dibayarkan pada bulan Januari 2026 senilai Rp. 2,434,641;

2.Tagihan telepon/internet Bulan Desember 2025 yang terbit tagihannya dan harus dibayarkan pada bulan Januari 2026 senilai Rp. 10,480,365; dan

3.Tagihan air Bulan Desember 2025 yang terbit tagihannya dan harus dibayarkan pada bulan Januari 2026 senilai Rp. 545.582.

No	Unit Kerja	Tagihan Listrik	Tagihan Telepon/ Internet	Tagihan Air
1	Pangkalan PSDKP Batam		6.507.076	
2	Satwas PSDKP Tanjung Jabung Barat	107.657	676.550	
3	Satwas PSDKP Tanjung Pinang	619.152	467.000	172.400
4	Satwas PSDKP Bangka	1.077.603	632.150	163.500
5	Satwas PSDKP Belitung		434.290	60.820
6	Satwas PSDKP Anambas			
7	Satwas PSDKP Palembang	630.229	946.799	148.862
8	Satwas PSDKP Natuna			
9	Wilker PSDKP Moro			
10	Wilker PSDKP Tanjung Balai Karimun		816.500	
Jumlah		2.434.641	10.480.365	545.582

C.27 Utang yang Belum ditagihkan

*Utang yang
Belum
Ditagihkan
Rp. 0*

Nilai utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang yang ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Utang yang belum ditagihkan merupakan transaksi gantung yaitu transaksi yang sudah ada BAST/SPBy-nya pada bulan Agustus dan September 2025, namun belum diproses lebih lanjut untuk pembayaran atau belum sepenuhnya selesai sampai periode tutup buku TA 2025.

C.28 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp. 0*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.29 Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.30 Ekuitas

*Ekuitas
Rp.
119,119,142,593*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 119,119,142,593 dan Rp. 118,910,635,585 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP
Rp.
63,869,772

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 63,869,772 dan Rp. 191,101,692.

TABEL PENDAPATAN PNBP TA 2025 DAN TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024
Pendapatan Denda Penyelesaian pekerjaan Pemerinatah	0	97.625.944
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	46.362.472	48.406.008
Pendapatan Denda Lainnya	0	0
Pendapatan Penjualan Alsln	8.488.000	30.277.740
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran	9.019.300	14.792.000
Jumlah	63.869.772	191.101.692

Adapun Rincian Pendapatan Tahun 2025 adalah:

1. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Januari 2025 senilai Rp. 4,033,834 dengan Nomor NTPN : 6C99661QVD2O20AN tanggal 18 Maret 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP.14/Lan.2/TU.410/I/2025 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
2. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Februari 2025 senilai Rp. 4,033,834 dengan Nomor NTPN : 88B2A61QVD8PQB52 tanggal 21 Mei 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP.14/Lan.2/TU.410/I/2025 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
3. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Maret 2025 senilai Rp. 4,033,834 dengan Nomor NTPN :

E614C48VVO6HAC08 tanggal 5 Juni 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 50/Lan.2/TU.410/III/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;

4. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan April 2025 senilai Rp. 4,033,834 dengan Nomor NTPN : E7FD23CIFTNA46F4 tanggal 11 Oktober 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 50/Lan.2/TU.410/III/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
5. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Mei 2025 senilai Rp. 3,522,950 dengan Nomor NTPN : E475B3CIFTT56LG8 tanggal 8 September 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 64/Lan.2/TU.410/V/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
6. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Juni 2025 senilai Rp. 3.778.392 dengan Nomor NTPN : D84FC0NA0E920BOQ tanggal 17 Oktober 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 64/Lan.2/TU.410/V/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
7. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Juli 2025 senilai Rp. 3.778.392 dengan Nomor NTPN : F4B4E0NA0EEO8IRG tanggal 8 Desember 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 64/Lan.2/TU.410/V/2025

tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;

8. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Agustus 2025 senilai Rp. 3.778.392 dengan Nomor NTPN : A64C08N3ETK7VC3L tanggal 8 Desember 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 64/Lan.2/TU.410/V/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
9. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan September 2025 senilai Rp. 4.033.834 dengan Nomor NTPN : A93C02G503JP25T3 tanggal 17 Desember 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP.124/Lan.2/TU.410/IX/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
10. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Oktober 2025 senilai Rp. 4.033.834 dengan Nomor NTPN : 35DC33CIFU65G2SA tanggal 17 Desember 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP.124/Lan.2/TU.410/IX/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
11. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan November 2025 senilai Rp. 3.778.392 dengan Nomor NTPN : 8B1B03CIFU66J9QO tanggal 18 Desember 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 64/Lan.2/TU.410/V/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;

12. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Bulan Desember 2025 senilai Rp. 3.5228.950 dengan Nomor NTPN : B7D806U8F8FSF53J tanggal 15 Desember 2025. Sesuai Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : KEP. 248 /Lan.2/TU.410/XII/2025 tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pangkalan PSDKP Batam TA 2025;
13. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama AMRI SEPTIADI, dengan Nomor NTPN : 419AB55DFIMHSG7G tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp. 140,600;
14. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ADIE WIJAYA, dengan Nomor NTPN : DB88D1JNG8D085BH tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 210,900;
15. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ALFIANI HASAN, dengan Nomor NTPN : 8412F2G502VCMJH3 tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
16. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ALIEM WIJAYA, dengan Nomor NTPN : E59C71JNG8D087F7 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 210,190;

17. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ALIZAR, dengan Nomor NTPN : 0FA2948VVO45GMJ6 tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 35,000;
18. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ANDI IRVAN TAUFAN AMAL , dengan Nomor NTPN : CBCD42G502VI4436 tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 105,450;
19. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ARI MUHANSOR, dengan Nomor NTPN : 7B3FC3CIFTHP3QDF tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
20. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ANTON SUANDA, dengan Nomor NTPN : BEB162G502VCKS1L tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 105,450;
21. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ARDIANSYAH, dengan Nomor

NTPN : E8B4961QVD8U8QQS tanggal 29 Mei 2024 senilai Rp. 210,900;

22. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ARDIANSYAH KURNIAWAN, dengan Nomor NTPN : 0B4D861QVD8UAI7B tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

23. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ARUMWATI, dengan Nomor NTPN : 0D00E7QLV2DN3N0M tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 105,450;

24. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama BUDI SANTOSO, dengan Nomor NTPN : EF95561QVD8U97FM tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 281,200;

25. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama BUKHARI, dengan Nomor NTPN : DC7921JNG8D07NL7 tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 316,350;

26. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama DEA MUTIARA NABILLA,

dengan Nomor NTPN : D572055DFIMFQ32D tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 175,750;

27. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama DIAN PRAWIDO A. SITEPU, dengan Nomor NTPN : 63BC80NA0DQJQH3F tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 455,000;

28. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama DINDA TRIMUDYA, dengan Nomor NTPN : B2DD02G502VCKUFL tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 140,600;

29. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama FABRIANSYAH ADRIANTO, dengan Nomor NTPN : B64C30NA0DSTB8GA tanggal 3 Juni 2024 senilai Rp. 281,200;

30. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama FAHRUR ROZI, dengan Nomor NTPN : 5208055DFIMK5S2V tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 316,350;

31. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama FIRMAN KODRATO, dengan

Nomor NTPN : 7E96D55DFIMHTEIG tanggal 26 Mei 2024
senilai Rp. 35,150;

32. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama FITRIA ANGGRAINI, dengan Nomor NTPN : 4FBA50NA0DQJQSAU tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 105,450;

33. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama GLEN EVAND, dengan Nomor NTPN : BB2FA1JNG8D08LVO tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 246,050;

34. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HADI PUSPITO, dengan Nomor NTPN : 8FB513CIFTHP3MGO tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 70,300;

35. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HAFID ALFAJRI, dengan Nomor NTPN : 96ACA61QVD8UAG5N tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

36. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HARPANDI, dengan Nomor

NTPN : 636A50NA0DQJSMHV tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

37. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HASNUL BARKI, dengan Nomor NTPN : 9CA8D55DFIMHS3OR tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp175,750;

38. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HENGKY MANURUNG, dengan Nomor NTPN : 8334E0NA0DQJR1TU tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 210,900;

39. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HERI SETIAWAN, dengan Nomor NTPN : 641143CIFTHP1V3S tanggal 1 Juni 2024 senilai Rp. 105,450;

40. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HIBRID RIZKIYANU, dengan Nomor NTPN : A79582G502VCKE93 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 665,000;

41. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama INDAH KESUMA A, dengan

Nomor NTPN : 340836U8F7RANI7V tanggal 26 Mei 2024
senilai Rp. 35,150;

42. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama IWAN SISWANDI, dengan Nomor NTPN : 04D2D1JNG8D09QF7 tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

43. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama JAKI MOCHTAR, dengan Nomor NTPN : 00ED961QVD8UAIDS tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

44. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama JIMMY BELUNG, dengan Nomor NTPN : E497161QVD8UAJK2 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

45. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama JUNET F.M. AMBARITA, dengan Nomor NTPN : E79E07QLV2DN4I5L tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

46. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama KORI APRIYANTO, dengan

Nomor NTPN : 05A2D48VVO45FBTV tanggal 28 Mei 2024
senilai Rp. 246,050;

47. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama KOTOT SETIADI, dengan Nomor NTPN : 30B2055DFIMHSA6J tanggal 29 Mei 2024 senilai Rp. 175,750;

48. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama LUTFI FELANIE, dengan Nomor NTPN : 82ACA7QLV2DPDMH9 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 140,600;

49. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama MAPUTRA PRASETYO, dengan Nomor NTPN : E39E455DFIMHS0HT tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 175,750;

50. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama MISDI, dengan Nomor NTPN : DF4F555DFIMHSIUR tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 69,700;

51. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama MUHAMMAD AFIF, dengan

Nomor NTPN : E43550NA0DQJQVUN tanggal 28 Mei 2024
senilai Rp. 210,900;

52. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama MUSLANI, dengan Nomor NTPN : 2C0D255DFIMHRDAR tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 104,550;

53. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama PRIHANDOKO, dengan Nomor NTPN : 2805B1JNG8D089JU tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 175,750;

54. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama RIDHO ILAHI, dengan Nomor NTPN : 6320C6U8F7RANQGA tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 35,000;

55. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ROBIYANTO TANUM, dengan Nomor NTPN : 717BE0NA0DQJSFVB tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 70,300;

56. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ROZALI, dengan Nomor NTPN

: BB36D61QVD8UAEJN tanggal 30 Mei 2024 senilai Rp. 70,300;

57. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ROZI DETA SURINA, dengan Nomor NTPN : 79F331JNG8D07K1B tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp. 350,000;

58. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SABRAN OKTA, dengan Nomor NTPN : E4C743CIFTHP2GKQ tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 140,600;

59. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SAIFUL ANAM, dengan Nomor NTPN : E01656U8F7RANR4E tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

60. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SATRIA RAMADHAN, dengan Nomor NTPN : F247948VVO45F5AN tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 246,050;

61. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SEIVO GREVO

WEWENGKANG, dengan Nomor NTPN :
06CD30NA0DQJQOFH tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp.
281,200;

62. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SENTANU BEKTI S.F., dengan Nomor NTPN : D9ADE55DFIMHRFAA tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 455,000;

63. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SYAHRIL, dengan Nomor NTPN : 547842G502VCMJI9 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

64. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama TRI CAHYONO, dengan Nomor NTPN : 0EEBD61QVD8UAMGU tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 70,300;

65. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama TRI WARNI, dengan Nomor NTPN : E719548VVO6EV9A2 tanggal 3 Juni 2024 senilai Rp. 140,600;

66. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan

Desember 2024 atas nama TURMAN HARDIANTO MAHA, dengan Nomor NTPN : 4761A2G502VCO756 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 313,650;

67. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama VINA MAIRA SARI, dengan Nomor NTPN : 83AA87QLV2DN4QC7 tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

68. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama WIDODO, dengan Nomor NTPN : 48F0E0NA0DQJSJFE tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

69. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama YASIR MAULANA, dengan Nomor NTPN : D10F30NA0DQJQM0N tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 350,000;

70. Pendapatan dari Penjualan Alat dan Mesin senilai Rp. 8,488,000 dengan Nomor NTPN : 3F4466U8F86IE8SO tanggal 3 September 2025. Sesuai Risalah Lelang Nomor : 282/03.04/2025-01 berupa 1 (satu) paket scrap alat angkutan berupa Speed Boat/Motor Tempel dan Rubber Boat.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp. 13.541.111.573 Jumlah Beban Pegawai pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.541.111.573 dan Rp. 13.506.510.383. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai mengalami penurunan senilai 0,26 %. Hal ini disebabkan terdapat mutasi pegawai ke UPT lain dari Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 17 orang dan 3 orang dari UPT lain ke Pangkalan PSDKP Batam pada TA 2025, penambahan ASN (PPPK) sebanyak 23 orang pegawai per bulan Oktober 2025, Kenaikan Gaji Berkala, Naik Pangkat, Kenaikan Jabatan Fungsional.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	3.951.744.800	4.215.344.000	(6,25)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	58.613	67.432	(13,08)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	330.869.750	365.446.740	(9,46)
Belanja Tunj. Anak PNS	104.523.996	114.913.244	(9,04)
Belanja Tunj. Struktural PNS	30.060.000	25.570.000	17,56
Belanja Tunj. Fungsional PNS	149.170.000	154.255.000	(3,30)
Belanja Tunj. PPh PNS	20.307.695	23.160.400	(12,32)
Belanja Tunj. Beras PNS	250.935.300	281.713.800	(10,93)
Belanja Uang Makan PNS	399.522.000	318.524.000	25,43
Belanja Tunjangan Umum PNS	119.885.000	136.440.000	(12,13)
Belanja Gaji Pokok PPPK	969.815.300	743.003.200	30,53
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.743	16.083	10,32
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	66.286.410	44.665.960	48,40
Belanja Tunjangan Anak PPPK	14.192.156	9.968.308	42,37
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	59.100.000	66.960.000	(11,74)
Belanja Tunjangan Beras PPPK	62.932.980	45.841.860	37,28
Belanja Uang Makan PPPK	81.618.000	30.193.000	170,32
Belanja Tunjangan Umum PPPK	20.590.000	0	100,00
Belanja Uang Lembur	251.320.000	289.170.000	(13,09)
Belanja Uang Lembur PPPK	67.746.000	16.630.000	307,37
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5.366.876.233	5.711.894.036	(6,04)
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.223.539.597	912.733.320	34,05
Jumlah Belanja	13.541.111.573	13.506.510.383	0,26

Selisih Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai TA 2025

URAIAN	BELANJA	BEBAN	SELISIH
Belanja Gaji Pokok PNS	3.951.744.800	3.951.744.800	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	58.669	58.613	56
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	330.869.750	330.869.750	-
Belanja Tunj. Anak PNS	104.523.996	104.523.996	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	30.060.000	30.060.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	149.170.000	149.170.000	-
Belanja Tunj. PPh PNS	20.307.695	20.307.695	-
Belanja Tunj. Beras PNS	250.935.300	250.935.300	-
Belanja Uang Makan PNS	399.522.000	399.522.000	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	119.885.000	119.885.000	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	969.815.300	969.815.300	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.743	17.743	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	66.286.410	66.286.410	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	14.192.156	14.192.156	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	59.100.000	59.100.000	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	62.932.980	62.932.980	-
Belanja Uang Makan PPPK	81.618.000	81.618.000	-
Belanja Uang Lembur	20.590.000	20.590.000	-
Belanja Uang Lembur PPPK	251.320.000	251.320.000	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	67.746.000	67.746.000	-
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	5.366.876.233	5.366.876.233	-
Pengembalian Uang Makan PNS	1.223.539.597	1.223.539.597	-
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	-56	0	(56)
Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	-
Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS	0	0	-
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	0	-
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	0	-
Pengembalian Belanja Tunj. Kinerja	0	0	-
Jumlah Belanja	13.541.111.573	13.541.111.573	0

Adapun penjelasan selisih belanja pegawai dengan beban pegawai di TA 2025 senilai RP. 56 yaitu pengembalian belanja pembulatan gaji PNS senilai Rp. 56 Merupakan pengembalian belanja pembulatan yang di potong melalui SPM kekurangan gaji PNS.

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp.
38,470,510*

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 38,470,510 dan Rp. 14,512,500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan mengalami peningkatan 165,09 % pada TA 2025.

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	38.470.510	14.512.500	0,00
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0,00
Beban Persediaan Bahan baku	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	38.470.510	14.512.500	165,09

Selisih Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan TA 2025

URAIAN	BELANJA	BEBAN	SELISIH
Beban Persediaan Konsumsi	67.492.227	38.470.510	29.021.717
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	-
Beban Persediaan Bahan baku	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya	0	0	-
Jumlah	67.492.227	38.470.510	29.021.717

Penjelasan selisih Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan dikarenakan belanja persediaan lebih besar (saldo awal tahun 2025 dan pembelian persediaan selama tahun 2025) dibanding penggunaan persediaan (barang konsumsi yang digunakan selama tahun 2025) dalam periode pelaporan yang sama.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp.
8,777,262,147*

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 8,777,262,147 dan Rp. 11,502,410,678. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa TA 2025 mengalami Penurunan 43,56 % dari TA 2024 disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga besar belanja barang diblokir selain itu adanya kapal pengawas yang berdampak pada penurunan beban dan belanja bahan.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	3.715.514.978	3.877.279.359	(4,17)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	190.988.100	381.576.566	(49,95)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.631.833	14.806.900	(68,72)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	143.640.000	133.842.000	7,32
Beban Barang Operasional Lainnya	305.948.500	422.117.000	(27,52)
Beban Bahan	9.412.819.977	16.573.028.025	(43,20)
Beban Honor Output Kegiatan	61.400.000	122.200.000	(49,75)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	701.983.610	1.449.872.015	(51,58)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.839.400	35.111.000	(94,76)
Beban Langganan Listrik	895.226.762	925.915.707	(3,31)
Beban Langganan Telepon	176.815.789	234.243.218	(24,52)
Beban Langganan Air	204.596.012	166.966.282	22,54
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5.401.263	9.125.869	(40,81)
Beban Sewa	85.254.000	310.846.750	(72,57)
Beban Jasa Profesi		52.800.000	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	371.853.220	876.645.102	(57,58)
Jumlah	16.277.913.444	25.586.375.793	(36,38)

Selisih Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Beban Barang dan Jasa TA 2025

URAIAN	Belanja	Beban	Selisih
Belanja Keperluan Perkantoran	3.715.514.978	3.715.514.978	-
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	190.988.100	190.988.100	-
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.631.833	4.631.833	-
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	143.640.000	143.640.000	-
Belanja Barang Operasional Lainnya	305.948.500	305.948.500	-
Belanja Bahan	9.412.819.977	9.412.819.977	-
Belanja Honor Output Kegiatan	61.400.000	61.400.000	-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	701.983.610	701.983.610	-
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.839.400	1.839.400	-
Belanja Langganan Listrik	953.108.677	895.226.762	57.881.915
Belanja Langganan Telepon	191.027.797	176.815.789	14.212.008
Belanja Langganan Air	205.449.788	204.596.012	853.776
Belanja Sewa	5.401.263	5.401.263	-
Belanja Jasa Lainnya	85.254.000	85.254.000	-
Belanja Jasa Profesi	-	-	-
Belanja Jasa Lainnya	371.853.220	371.853.220	-
TOTAL	16.350.861.143	16.277.913.444	72.947.699

Penjelasan Selisih Belanja Barang dan jasa dengan Beban Beban Barang dan Jasa TA 2025 yaitu :

1. Terdapat selisih Belanja Langganan Listrik dan Beban Langganan Listrik senilai Rp. 57,881,915, berupa Pengurangan Jurnal Balik Langganan Listrik 2024 dengan Langganan Listrik 2025 Rp. 953,108,677 - Rp. 895,226,762 = Rp. 57,881,915.
2. Terdapat selisih Belanja Langganan Telepon/Internet dan Beban Langganan Telepon/Internet senilai Rp. 14,212,008, berupa Pengurangan Jurnal Balik Langganan Telepon/Internet 2024 dengan Langganan Telepon/Internet 2025 Rp. 191,027,797 - Rp. 176,815,789 = Rp. 14,212,008.
3. Terdapat selisih Belanja Langganan Air dan Beban Langganan Air senilai Rp. 853,776 berupa Pengurangan Jurnal Balik Langganan Air 2024 dengan Langganan Air 2025, Rp. 205,449,788 - Rp. 204,596,012 = Rp. 853,776.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.184.457.686 dan Rp. 5.439.325.910. *Beban Pemeliharaan* merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin mengalami Penurunan 59,84 % di TA

2025 dikarenakan efisiensi anggaran. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	325.333.000	524.246.286	(37,94)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.598.510.095	3.791.990.845	(57,85)
Beban Persediaan Suku Cadang	206.739.575	1.066.442.279	(80,61)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	56.646.500	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	53.875.016	0	100,00
Jumlah	2.184.457.686	5.439.325.910	(59,84)

*Selisih Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan dan
Jasa TA 2024*

URAIAN	BELANJA	BEBAN	SELISIH
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	325.333.000	325.333.000	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.623.006.095	1.598.510.095	24.496.000
Persediaan suku cadang	0	206.739.575	(206.739.575)
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		0	-
Pemeliharaan Jaringan	53.875.016	53.875.016	-
Jumlah	2.002.214.111	2.184.457.686	(182.243.575)

Penjelasan selisih Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 senilai Rp. 24.496.000 yaitu adanya koreksi pencatatan yang seharusnya belanja pemeliharaan non asset tercatat menjadi belanja asset. Hal tersebut telah dikoreksi berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Nomor : B.2788/PSDKPLan.2/PL.750/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

Penjelasan selisih belanja suku cadang dengan beban suku cadang yaitu :

Habis Pakai 117114	-255.980.890
Hasil Opname Fisik 117114	49.241.315
Pembelian	0
Kesalahan kode akun 117121	0
Jumlah	-206.739.575

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.
1.282.707.119*

Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.282.707.119 dan Rp. 6.064.768.315. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas sebesar 78,85 % dalam rangka efisiensi anggaran TA 2025.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	972.455.460	4.425.175.920	-78,02
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	310.251.659	723.235.000	-57,10
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	391.134.367	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota	0	525.223.028	-100,00
Jumlah	1.282.707.119	6.064.768.315	-78,85

Selisih Belanja Perjalanan Dinas Dengan Beban Perjalanan Dinas TA 2024

URAIAN	BELANJA	BEBAN	SELISIH
Perjalanan Biasa	972.455.460	972.455.460	-
Perjalanan Dinas Dalam Kota	310.251.659	310.251.659	-
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			-
Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota			-
Jumlah	1.282.707.119	1.282.707.119	-

Tidak terdapat selisih belanja perjalanan dinas di Pangkalan PSDKP batam selama TA 2025.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial Rp. 0*

Beban Bantuan Sosial pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp.
7,957,724,471*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 7,957,724,471 dan Rp. 9.885.623.850. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.967.680.793	7.510.969.429	(20,55)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	820.242.453	785.994.664	4,36
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	633.301.296	1.024.433.166	(38,18)
Beban Penyusutan Irigasi	430.738.870	437.792.112	(1,61)
Beban Penyusutan Jaringan	105.761.059	99.294.479	6,51
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		27.140.000	(100,00)
Jumlah Penyusutan	7.957.724.471	9.885.623.850	(19,50)
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

D.12 Kegiatan Non Operasional

*Surplus/
Defisit dari
Kegiatan
Non
Operasional
Rp.
9.019.300*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	9.019.300	14.792.000	(39,03)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Beban kegiatan non operasional lainnya	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	9.019.300	14.792.000	(39,03)

*)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama AMRI SEPTIADI,dengan Nomor NTPN : 419AB55DFIMHSG7G tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp. 140,600;
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ADIE WIJAYA,dengan Nomor NTPN : DB88D1JNG8D085BH tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 210,900;
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ALFIANI HASAN,dengan Nomor

NTPN : 8412F2G502VCMJH3 tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp. 31,150;

4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ALIEM WIJAYA, dengan Nomor NTPN : E59C71JNG8D087F7 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 210,190;
5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ALIZAR, dengan Nomor NTPN : 0FA2948VVO45GMJ6 tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 35,000;
6. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ANDI IRVAN TAUFAN AMAL , dengan Nomor NTPN : CBCD42G502VI4436 tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 105,450;
7. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ARI MUHANSOR, dengan Nomor NTPN : 7B3FC3CIFTHP3QDF tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
8. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ANTON SUANDA, dengan

Nomor NTPN : BEB162G502VCKS1L tanggal 28 Mei 2024
senilai Rp. 105,450;

9. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ARDIANSYAH, dengan Nomor NTPN : E8B4961QVD8U8QQS tanggal 29 Mei 2024 senilai Rp. 210,900;
10. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ARDIANSYAH KURNIAWAN, dengan Nomor NTPN : 0B4D861QVD8UAI7B tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
11. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ARUMWATI, dengan Nomor NTPN : 0D00E7QLV2DN3N0M tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 105,450;
12. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama BUDI SANTOSO, dengan Nomor NTPN : EF95561QVD8U97FM tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 281,200;
13. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama BUKHARI, dengan Nomor NTPN

: DC7921JNG8D07NL7 tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 316,350;

14. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama DEA MUTIARA NABILLA, dengan Nomor NTPN : D57205DFIMFQ32D tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 175,750;
15. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama DIAN PRAWIDO A. SITEPU, dengan Nomor NTPN : 63BC80NA0DQJQH3F tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 455,000;
16. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama DINDA TRIMUDYA, dengan Nomor NTPN : B2DD02G502VCKUFL tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 140,600;
17. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama FABRIANSYAH ADRIANTO, dengan Nomor NTPN : B64C30NA0DSTB8GA tanggal 3 Juni 2024 senilai Rp. 281,200;
18. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama FAHRUR ROZI, dengan Nomor

NTPN : 5208055DFIMK5S2V tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 316,350;

19. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama FIRMAN KODRATO, dengan Nomor NTPN : 7E96D55DFIMHTEIG tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
20. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama FITRIA ANGGRAINI, dengan Nomor NTPN : 4FBA50NA0DQJQSAU tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 105,450;
21. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama GLEN EVAND, dengan Nomor NTPN : BB2FA1JNG8D08LVO tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 246,050;
22. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HADI PUSPITO, dengan Nomor NTPN : 8FB513CIFTHP3MGO tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 70,300;
23. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HAFID ALFAJRI, dengan Nomor

NTPN : 96ACA61QVD8UAG5N tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

24. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HARPANDI, dengan Nomor NTPN : 636A50NA0DQJSMHV tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

25. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HASNUL BARKI, dengan Nomor NTPN : 9CA8D55DFIMHS3OR tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp175,750;

26. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HENGKY MANURUNG, dengan Nomor NTPN : 8334E0NA0DQJR1TU tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 210,900;

27. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HERI SETIAWAN, dengan Nomor NTPN : 641143CIFTHP1V3S tanggal 1 Juni 2024 senilai Rp. 105,450;

28. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama HIBRID RIZKIYANU, dengan

Nomor NTPN : A79582G502VCCKE93 tanggal 26 Mei 2024
senilai Rp. 665,000;

29. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama INDAH KESUMA A, dengan Nomor NTPN : 340836U8F7RANI7V tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
30. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama IWAN SISWANDI, dengan Nomor NTPN : 04D2D1JNG8D09QF7 tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
31. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama JAKI MOCHTAR, dengan Nomor NTPN : 00ED961QVD8UAIDS tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
32. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama JIMMY BELUNG, dengan Nomor NTPN : E497161QVD8UAJK2 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
33. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama JUNET F.M. AMBARITA, dengan

Nomor NTPN : E79E07QLV2DN4I5L tanggal 28 Mei 2024
senilai Rp. 35,150;

34. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama KORI APRIYANTO, dengan Nomor NTPN : 05A2D48VVO45FBTV tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 246,050;
35. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama KOTOT SETIADI, dengan Nomor NTPN : 30B2055DFIMHSA6J tanggal 29 Mei 2024 senilai Rp. 175,750;
36. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama LUTFI FELANIE, dengan Nomor NTPN : 82ACA7QLV2DPDMH9 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 140,600;
37. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama MAPUTRA PRASETYO, dengan Nomor NTPN : E39E455DFIMHS0HT tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 175,750;
38. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama MISDI, dengan Nomor NTPN :

DF4F555DFIMHSIUR tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 69,700;

39. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama MUHAMMAD AFIF, dengan Nomor NTPN : E43550NA0DQJQVUN tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 210,900;
40. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama MUSLANI, dengan Nomor NTPN : 2C0D255DFIMHRDAR tanggal 28 Mei 2024 senilai Rp. 104,550;
41. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama PRIHANDOKO, dengan Nomor NTPN : 2805B1JNG8D089JU tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 175,750;
42. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama RIDHO ILAHI, dengan Nomor NTPN : 6320C6U8F7RANQGA tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 35,000;
43. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ROBIYANTO TANUM, dengan

Nomor NTPN : 717BE0NA0DQJSFVB tanggal 26 Mei 2024
senilai Rp. 70,300;

44. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ROZALI, dengan Nomor NTPN : BB36D61QVD8UAEJN tanggal 30 Mei 2024 senilai Rp. 70,300;
45. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama ROZI DETA SURINA, dengan Nomor NTPN : 79F331JNG8D07K1B tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp. 350,000;
46. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SABRAN OKTA, dengan Nomor NTPN : E4C743CIFTHP2GKQ tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 140,600;
47. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SAIFUL ANAM, dengan Nomor NTPN : E01656U8F7RANR4E tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
48. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SATRIA RAMADHAN, dengan

Nomor NTPN : F247948VVO45F5AN tanggal 26 Mei 2024
senilai Rp. 246,050;

49. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SEIVO GREVO WEWENGKANG, dengan Nomor NTPN : 06CD30NA0DQJQOFH tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 281,200;
50. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SENTANU BEKTI S.F., dengan Nomor NTPN : D9ADE55DFIMHRFAA tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 455,000;
51. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama SYAHRIL, dengan Nomor NTPN : 547842G502VCMJI9 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;
52. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama TRI CAHYONO, dengan Nomor NTPN : 0EEBD61QVD8UAMGU tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 70,300;
53. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan

Desember 2024 atas nama TRI WARNI, dengan Nomor NTPN : E719548VVO6EV9A2 tanggal 3 Juni 2024 senilai Rp. 140,600;

54. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama TURMAN HARDIANTO MAHA, dengan Nomor NTPN : 4761A2G502VCO756 tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 313,650;

55. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama VINA MAIRA SARI, dengan Nomor NTPN : 83AA87QLV2DN4QC7 tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

56. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama WIDODO, dengan Nomor NTPN : 48F0E0NA0DQJSJFE tanggal 26 Mei 2024 senilai Rp. 35,150;

57. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan Desember 2024 atas nama YASIR MAULANA, dengan Nomor NTPN : D10F30NA0DQJQM0N tanggal 31 Mei 2024 senilai Rp. 350,000.

D.13 Pos Luar Biasa

*Pos Luar
Biasa Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos luar biasa TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing adalah Rp. 0 dan Rp. 0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.
118,910,635,585

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 118,910,635,585 dan Rp. 121,943,831,378.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp.
(41,237,039,326)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. (41,237,039,326) dan Rp. (60,724,506,947) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-Lain
Rp (24,496,000)*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 24,496,000 dikarenakan kesalahan pencatatan pengelompokan belanja senilai total Rp. 24.496.000 (SP2D : 259991330123137 ; SPM : 00410T/325156/ 2025) berupa Belanja Modal Jaringan sebesar pembayaran belanja modal dalam rangka pengadaan instalasi air dari PT. MGGs untuk instalasi air bersih kapal pengawas ke dermaga kantor (invoice No:2025/TPA-DKP/06/INV-0002 Tgl 01 Juni 2025) yang seharusnya Belanja Pemeliharaan Non Aset namun tercatat dalam Belanja Aset pada Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	URAIAN AKUN	KODE BARANG	NILAI (RP)
1	Pembayaran belanja modal berupa pengadaan instalasi air Pangkalan PSDKP Batam	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5030101001	5.416.000
2	Pembayaran belanja modal berupa pengadaan instalasi air Pangkalan PSDKP Batam	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5030101001	9.190.000
3	Pembayaran belanja modal berupa pengadaan instalasi air Pangkalan PSDKP Batam	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5030101001	8.160.000
4	Pembayaran belanja modal berupa pengadaan instalasi air Pangkalan PSDKP Batam	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5030101001	1.730.000
TOTAL				24.496.000

Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan koreksi kesalahan kode barang atau pencatatan Modul Aset Tetap dengan Nomor : B.2788/PSDKPLan.2/PL.750 /VIII/ tanggal 20 Agustus 2025.

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp. 37,447,673,951*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 37,447,673,951 dan Rp. 57,491,243,002. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua

atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(63.869.772)
Ditagikan ke Entitas Lain	33.488.956.233
Transfer Masuk	5.860.273.272
Transfer Keluar	(1.837.685.782)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	37.447.673.951

Rincian Transaksi Antar Entitas senilai Rp. 37,447,673,951 terdiri dari:

1. Nilai yang diterima dari entitas lain merupakan Pendapatan dari Lelang Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp. 8,488,000, Sewa Rumah Dinas Bulan Januari - Desember 2025 senilai Rp. 46,362,472, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS total Rp. 9,019,300 sehingga total transaksi yang diterima dari entitas lain adalah Rp. 63,869,772;
2. Nilai yang diterima dari entitas lain merupakan realisasi anggaran sampai dengan TA 2025 Rp. 33,488,956,233;
3. Transfer masuk senilai Rp. 5.860.273.272 yang terdiri dari :
 - a) Transfer masuk senilai Rp. 1,706,892,000 pada TA 2025 berupa penambahan nilai Tanah Bangunan Laboratorium gedung sebesar 701 m² dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang berdasarkan BAST BMN Nomor : B.440/SKIPM.PLB/PL.450/VIII/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025;

- b) Transfer masuk berdasarkan BAST BM Nomor : B.440/SKIPM.PLB/PL.450/VIII/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025 berupa alat Kantor dan Rumah Tangga dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang yaitu 1 Unit Papan Visual dengan nilai Rp. 6.729.500;
- c) Transfer masuk senilai Rp. 1,160,874,197 untuk Gedung dan Bangunan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada periode TA 2025 berupa Gedung Laboratorium Permanen sebanyak 1 unit dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang berdasarkan BAST BMN Nomor : B.440/SKIPM.PLB/PL.450/ VIII/ 2025 pada tanggal 15 Agustus 2025;
- d) Terdapat mutasi tambah dan berupa transfer masuk Jaringan dan Irigasi dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang berdasarkan BAST BMN Nomor : B.440/SKIPM.PLB/PL.450/ VIII/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025 dengan nilai masing-masing Rp. 120,000,000 dan Rp. 2,445,000;
- e) Transfer masuk masuk berdasarkan BAST Nomor : B.646/DJPSDKP.1/PL.450/XII/2025 pada tanggal 31 Desember 2025 berupa Drone (ROV SKYRO RO Drone Bawah Air) senilai Rp. 3.169.748.797.

Transfer masuk total senilai Rp. 6.166.689.494 dikurangi akumulasi penyusutan Rp. 306.416.222 sehingga nilai transfer masuk pada rincian transaksi antar entitas adalah Rp. 5.860.273.272.

4. Transfer keluar senilai Rp. 1,837,685,782 yang terdiri dari :
- a) Transfer keluar berupa berupa peralatan dan mesin yaitu KP. HIU 05 sesuai dengan BAST Nomor : B.7/PSDKPLan.2/PL.510/I/2025 tanggal 1 Januari 2025 dari Pangkalan PSDKP Batam ke Pangkalan PSDKP Lampulo dengan nilai total Rp. 27.823.183.110;
 - b) Transfer keluar suku cadang KP. HIU 05 masing-masing senilai Rp. 550,027,664.

Transfer keluar senilai total Rp. 28,373,210,774 dikurangi nilai akumulasi penyusutan Rp. 26.535.524.992 sehingga nilai transfer keluar pada rincian transaksi antar entitas adalah Rp. 1,837,685,782.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp. (63,869,772) sedangkan DKEL sebesar Rp. 33,488,956,233.

DDEL adalah Pendapatan dari Pendapatan dari Lelang Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp. 8,488,000, Sewa Rumah Dinas Bulan Januari – Desember 2025 senilai Rp. 46,362,472 dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu Berupa Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan PNS total Rp. 9,019,300 sehingga total transaksi yang diterima dari entitas lain adalah Rp. 63,869,772. DKEL adalah realisasi anggaran pada TA 2025 Rp. 33,488,956,233;

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer keluar yang terdiri dari :

1. Transfer keluar berupa berupa peralatan dan mesin yaitu KP. HIU 05 sesuai dengan BAST Nomor : B.7/PSDKPLan.2/PL.510/I/2025 tanggal 1 Januari 2025 dari Pangkalan PSDKP Batam ke Pangkalan PSDKP Lampulo dengan nilai total Rp. 27.823.183.110.
2. Transfer keluar suku cadang KP. HIU 05 masing-masing senilai Rp. 550,027,664.

Terdapat Transfer Masuk yang terdiri dari :

1. Transfer masuk senilai Rp. 1,706,892,000 pada TA 2025 berupa penambahan nilai Tanah Bangunan Laboratorium gedung sebesar 701 m² dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang berdasarkan BAST BMN Nomor : B.440/SKIPM.PLB/PL.450/VIII/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025;
2. Transfer masuk berdasarkan BAST BM Nomor : B.440/SKIPM.PLB/PL.450/VIII/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025 berupa alat Kantor dan Rumah Tangga dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang yaitu 1 Unit Papan Visual dengan nilai Rp. 6.729.500;
3. transfer masuk senilai Rp. 1,160,874,197 untuk Gedung dan Bangunan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada periode TA 2025 berupa Gedung Laboratorium Permanen sebanyak 1 unit dari Stasiun Karantina Ikan,

Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang berdasarkan BAST BMN Nomor : B.440/SKIPM.PLB/PL.450/ VIII/ 2025 pada tanggal 15 Agustus 2025;

4. Terdapat mutasi tambah dan berupa transfer masuk Jaringan dan Irigasi dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang berdasarkan BAST BMN Nomor : B.440/SKIPM.PLB/PL.450/ VIII/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025 dengan nilai masing-masing Rp. 120,000,000 dan Rp. 2,445,000;
5. Transfer masuk masuk berdasarkan BAST Nomor : B.646/DJPSDKP.1/PL.450/XII/2025 pada tanggal 31 Desember 2025 berupa Drone (ROV SKYRO RO Drone Bawah Air) senilai Rp. 3.169.748.797.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0-. dari total Rp.0,- yang diterima tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp.0.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp. 115,210,523,426 Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 118,910,635,585 dan Rp. 115,210,523,426.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Realisasi Pengadaan Belanja Bahan Bakar Minyak

Pada TA 2025 terdapat 1 kontrak pengadaan bahan bakar minyak yaitu kontrak tanggal 5 Mei 2025 dengan nomor kontrak B.371/PSDKPLan.2/PL.430/V/2025 senilai Rp. 3,057,555,000 dengan realisasi belanja pengadaan bahan bakar minyak senilai Rp. 2.595.792.000 (7 Termin) 84,90 % . Pada TA 2025 telah direalisasi sebanyak 4 termin dari kontrak, ada pun rincian realisasi pengadaan BBM yaitu :

1. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin I Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas senilai Rp. 133,133,000 dengan nomor SP2D 251371303001447 tanggal 14 Mei 2025 sesuai BAPP No B.209/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/V/2025 tgl 08 Mei 2025;
2. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin II Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas senilai Rp. 73,777,000 dengan nomor SP2D 251371303001608 tanggal 23 Mei 2025 sesuai BAPP No B.240/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/V/2025 tgl 21 Mei 2025;
3. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin III Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas senilai Rp. 653,961,000 dengan nomor SP2D 259991330009810 tanggal 12 Juni 2025 sesuai BAPP No B.277/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/VI/ 2025 tgl 10 Juni 2025;
4. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin IV Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas senilai Rp. 105,023,000 dengan nomor SP2D 259991330024553 tanggal 23 Juni 2025 sesuai BAPP No B.301/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/VI/ 2025 tgl 19 Juni 2025;

5. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin V Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas senilai Rp. 411,144,000 dengan nomor SP2D 259991330079374 tanggal 17 Juli 2025 sesuai BAPP No B.354/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/VII/2025 tgl 15 Juli 2025;
6. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin VI Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas senilai Rp. 557,889,000 dengan nomor SP2D 259991330141325 tanggal 14 Agustus 2025 sesuai BAPP No B.432/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/VIII/2025 tgl 12 Agustus 2025;
7. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin VII Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas senilai Rp. 660,865,000 dengan nomor SP2D 259991330190587 tanggal 8 September 2025 sesuai BAPP No B.501/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/IX/2025 tgl 3 September 2025;
8. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin I Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas (PNBP) senilai Rp. 124,721,000 dengan nomor SP2D 259991330190588 tanggal 8 September 2025 sesuai BAPP No B.503/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/IX/2025 tgl 3 September 2025; dan
9. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin II Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas (PNBP) senilai Rp. 105,650,000 dengan nomor SP2D 259991330234662 tanggal 25 September 2025 sesuai BAPP No B.561/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/IX/2025 tgl 22 September 2025;
10. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin VIII Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas senilai Rp. 212.553.000 dengan nomor SP2D 259991330293283 tanggal 16 Oktober 2025 sesuai BAPP No B.613/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/X

/2025 tgl 14 Oktober 2025;

11. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin III Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas (PNBP) senilai Rp. 527.774.000 dengan nomor SP2D 259991330293282 tanggal 16 Oktober 2025 sesuai BAPP No B.615/PPK/PSDKPLan.2 /PL.450/X/2025 tgl 14 Oktober 2025;
12. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin IV Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas (PNBP) senilai Rp. 770.298.000 dengan nomor SP2D 259991330376468 tanggal 14 November 2025 sesuai BAPP No B.680/PPK/PSDKPLan.2 /PL.450/XI/2025 tgl 11 November 2025;
13. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin V Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas (PNBP) senilai Rp. 581.073.000 dengan nomor SP2D 259991330420228 tanggal 28 November 2025 sesuai BAPP No B.722/PPK/PSDKPLan.2 /PL.450/XI/2025 tgl 26 November 2025;
14. Pembayaran Belanja Barang Berupa Termin I Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas (RM) senilai Rp. 368.676.000 dengan nomor SP2D 259991330473894 tanggal 10 Desember 2025 sesuai BAPP No B.757/PPK/PSDKPLan.2/ PL.450/XII/2025 tgl 5 Desember 2025;
15. Pembayaran Belanja Barang berupa Termin II Pengadaan Jual Beli BBM Kapal Pengawas (RM) senilai Rp. 1.390.318.000 dengan nomor SP2D 259991330516835 tanggal 19 Desember 2025 sesuai BAPP No B.793/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/XII/2025 tgl 17 Desember 2025;
16. Pembayaran Belanja Barang Berupa Lunas 100% Pekerjaan Jual Beli Bahan Bakar Minyak senilai Rp. 234.742.000 dengan nomor SP2D 259991330396597 tanggal 21 November 2025 sesuai BAST No : B.703/PPK/PSDKPLan.2 /PL.450/XI/2025 tanggal 19 November 2025;

17. Pembayaran Belanja Barang Berupa Lunas 100% Pekerjaan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (PNBP) senilai Rp. 234.742.000 dengan nomor SP2D 259991320659486 tanggal 21 November 2025 dengan nomor SP2D 259991330396597 tanggal 21 November 2025 sesuai BAST No : B.742/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025;
18. Pembayaran Belanja Barang Berupa Lunas 100% Pekerjaan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (RM) senilai Rp. 85.429.000 dengan nomor SP2D 259991330530786 tanggal 24 Desember 2025 sesuai BAST No : B.808/PPK/PSDKPLan.2/PL.450/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025.

Nama Kapal	Bulan	Sisa Volume BBM Awal (Liter)	Jumlah Pengisian (Liter)	Pemakaian (Liter)	Jumlah Sisa BBM Akhir (Liter)
a	b	d	e	f	h = (d+e-f)
KP. Hiu 03	Januari	4.000	-	500	3.500
	Februari	3.500	-	300	3.200
	Maret	3.200	-	100	3.100
	April	3.100	7.000	6.450	3.650
	Mei	3.650	20.000	21.650	2.000
	Juni	2.000	6.000	2.700	5.300
	Juli	5.300	21.000	22.300	4.000
	Agustus	4.000	13.000	15.000	2.000
	Sept	2.000	18.000	12.700	7.300
	Oktober	7.300	21.000	20.500	7.800
	November	7.800	-	6.800	1.000
	Desember	1.000	40.500	35.300	6.200
KP. Hiu 17	Januari	14.316	-	588	13.728
	Februari	13.728	-	280	13.448
	Maret	13.448	-	416	13.032
	April	13.032	-	160	12.872
	Mei	12.872	20.000	17.712	15.160
	Juni	15.160	23.000	22.008	16.152
	Juli	16.152	-	180	15.972
	Agustus	15.972	39.000	38.528	16.444
	Sept	16.444	21.000	28.796	8.648
	Oktober	8.648	43.000	35.644	16.004
	November	16.004	43.800	57.540	2.264
	Desember	2.264	63000	50254	15.010

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sisa Bahan Bakar Minyak Kapal Hiu 03 Nomor : 258/PSDKPLan.2-HIU.03/PL.450/ XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 sisa Bahan Bakar Minyak sebanyak 6.200 liter serta sisa Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas Hiu 17 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sisa Bahan Bakar Minyak Nomor : 393/PSDKPLan.2-Hiu.17/PL.450/ XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 sisa bahan bakar minyak solar sebanyak 15.010 liter. Pagu anggaran BBM Kapal Pengawas sebesar Rp. 7.187.195.000 yang terdiri dari anggaran BBM Kapal Pengawas senilai Rp. 4.887.510.000 dan anggaran BBM Kapal Pengawas (PNBP) Rp. 2.299.685.000 dan nilai realisasi BBM total s.d 31 Desember 2025 Rp. 7.187.195.000 dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS ANGGARAN	NAMA KAPAL	JUMLAH BBM (KL)	NILAI REALISASI (Rp)
1	PNBP	KP. HIU 03	31	555.238.000
2		KP. HIU 17	97,8	1.744.447.000
TOTAL PNBP			128,8	2.299.685.000
3	Rupiah Murni	KP. HIU 03	115,5	2.078.334.000
4		KP. HIU 17	155	2.809.176.000
TOTAL RUPIAH MURNI			270,5	4.887.510.000
TOTAL			399,300	7.187.195.000

Pagu Minus Belanja Pegawai (51XXXX)

Pada periode pelaporan TA 2025 tidak terdapat pagu minus pada akun belanja pegawai.

Bank Garansi

Pada TA 2025 tidak terdapat bank garansi untuk kegiatan di Pangkalan PSDKP Batam.

Rekening BPP

Pangkalan PSDKP Batam memiliki 10 BPP dengan rincian sebagai berikut :

1. BPP Satwas Tanjung Jabung Barat dengan no no rekening Virtual Account 9890953251561001
2. BPP Satwas Tanjung Pinang dengan no no rekening Virtual

- Account 9890953251561002
3. BPP Satwas Bangka dengan no no rekening Virtual Account 9890953251561003
 4. BPP Satwas Belitung dengan no no rekening Virtual Account 9890953251561004
 5. BPP Satwas Anambas dengan no no rekening Virtual Account 9890953251561005
 6. BPP Satwas Palembang dengan no no rekening Virtual Account 9890953251561006
 7. BPP Satwas Natuna dengan no no rekening Virtual Account 9890953251561007
 8. BPP KAPAL PENGAWAS dengan no no rekening Virtual Account 9890953251561008
 9. BPP WILKER MORO dengan no no rekening Virtual Account 9890953251561009
 10. BPP Satwas Bangka dengan no no rekening Virtual Account 9890953251561010

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor : KEP.9/KPA-LAN.2/KP.131/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Honorarium Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam TA 2025 adalah:

- Penanggung Jawab : Aliem Wijaya
- Koordinator : Dea Mutiara Nabilla
- Petugas : Hibrid Rizkiyanu
- Pelaporan : Fahrur Rozi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.12/PA/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Tentang Perubahan Ketujuh Puluh Satu Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan

Perikanan Nomor: KEP.79/MEN/KU.611/ 2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP. 10/KPA-LAN.2/KU.611/1/2025 tanggal 22 Januari 2025 Tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2025 serta Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.21/KPA-LAN.2/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 Tentang Perubahan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam.

Daftar nama pengelola anggaran Pangkalan PSDKP Batam:

- Nama : Samuel Sandi Rundupadang
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
- Nama : Muslani
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
- Nama : Fabriansyah Adrianto
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
- Nama : Heri Setiawan
Jabatan : Pejabat Penandatangan SPM
- Nama : Fahrur Rozi
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Pangkalan

PSDKP Batam terdapat pada fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dengan rincian sebagaimana terlampir :

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
04	EKONOMI							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	205.589.034.000	203.185.346.000	182.065.943.010	0	182.065.943.010	89,61	21.119.402.990
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	6.540.450.000	2.990.652.000	2.959.117.196	0	2.959.117.196	98,95	31.534.804
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	28.581.518.000	10.637.970.000	10.584.787.052	0	10.584.787.052	99,5	53.182.948
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	2.800.000.000	0	0	0	0	null	0
	JUMLAH PROGRAM Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	243.511.002.000	216.813.968.000	195.609.847.258	0	195.609.847.258	90,22	21.204.120.742
WA	Program Dukungan Manajemen							
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	395.220.276.000	356.871.870.000	351.302.838.156	1.008	351.302.837.148	98,44	5.569.032.852
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	395.220.276.000	356.871.870.000	351.302.838.156	1.008	351.302.837.148	98,44	5.569.032.852
	JUMLAH SUBFUNGSI PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	638.731.278.000	573.685.838.000	546.912.685.414	1.008	546.912.684.406	95,33	26.773.153.594
	JUMLAH FUNGSI EKONOMI	638.731.278.000	573.685.838.000	546.912.685.414	1.008	546.912.684.406	95,33	26.773.153.594